

Strategi Komunikasi Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoala dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020

Sitti Rahmawati Arfah¹

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi komunikasi panitia pemilihan kecamatan (PPK) Bontoala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontoala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi PPK Bontoala dikategorikan baik. Strategi komunikasi yang digunakan antara lain, tatap muka, media elektronik, sosial media, sosialisasi kepada pemilih milenial berupa ceramah dan dialog secara langsung dan menggunakan relawan demokrasi. Selanjutnya, informasi dalam bentuk program gerakan mencoklik, informasi berupa template cara memilih, informasi mengenai kapan pelaksanaan pemilih kepala daerah, serta informasi sah atau tidaknya surat suara yang dicoblos dan pemberian motivasi yang dilakukan PPK Bontoala tentang pemberian pemahaman pentingnya hadir ke TPS dan menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin, meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi PPK Bontoala yaitu kendala administrasi, waktu, kekurangan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas organisasi dan kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sosial media secara optimal.

Kata kunci: Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoala; Partisipasi Masyarakat; Strategi Komunikasi

Abstract

This study aims to identify and analyze the communication strategy of the Bontoala district election committee (PPK) in increasing public participation in the election of the mayor and deputy mayor of Makassar. The type of research used is qualitative with a descriptive approach and data collection through observation, interviews and documentation, analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research was conducted at the Bontoala District Election Committee (PPK) office. The results showed that the communication strategy of PPK Bontoala was categorized as good. The communication strategies used include, face-to-face, electronic media, social media, outreach to millennial voters in the form of direct dialogue and using democratic volunteers. Furthermore, information in the form of the clicking movement program, information in the form of templates on how to vote, information on when to conduct regional head voters, as well as information on whether or not the ballots were punched and the motivation given by PPK Bontoala about providing an understanding of the importance of attending polling stations and exercising their right to vote. to choose a leader, although there are still obstacles faced by PPK Bontoala, namely administrative constraints, time, lack of facilities and infrastructure in carrying out organizational tasks and lack of human resources capable of optimally operating social media.

Keywords: Bontoala District Election Committee; Community Participation; Communication Strategy

* Penulis Korespondensi

E-mail : strahmawatiarfah@unismuh.ac.id

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan secara serentak pada 9 Desember 2020. Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi covid-19 berada dalam situasi kontradiktif tentu terdapat tantangan yang cukup berat bagi penyelenggara Pilkada untuk menjaga keberlangsungan pemilihan secara demokratis dan berkualitas serta harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyebaran virus Covid-19.

Kota Makassar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang turut serta melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar diamanahkan untuk menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020.

Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 tentu membutuhkan komponen penyelenggara di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara. Dalam pelaksanaannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu aktor penting dalam pematuration data dan penyusunan daftar pemilih. Kualitas daftar pemilih menentukan baik dan buruknya kualitas penyelenggaraan dan kualitas hasil pemilihan pemilu/pemilihan kepala daerah, oleh sebab itu PPK memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pilkada.

Kondisi penyelenggaraan pilkada di ditengah pandemi covid-19 menimbulkan kontadiktif sehingga banyak peneliti pemilu tidak yakin terjadi peningkatan partisipasi masyarakat yang dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020. Tentu berbagai argumen terkait penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi covid-19 mengatakan tingkat partisipasi masyarakat akan rendah dimana masyarakat lebih memprioritaskan kesehatan mereka dibanding harus datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih dengan resiko dapat terpapar virus Covid-19.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 antara lain aktor politik, kinerja KPU Kota Makassar dan badan penyelenggara/*ad hoc* dalam mensosialisasikan partisipasi masyarakat dalam pemilihan, atau kesadaran politik masyarakat sendiri untuk turut andil berpartisipasi dalam pilkada, sehingga dapat terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020.

Salah satu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoala melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat dengan memberikan edukasi pentingnya pendidikan politik sangat dibutuhkan untuk menentukan calon pemimpin yang terbaik. Artinya sosialisasi yang sering dilakukan pihak PPK Bontoala adalah demi kesejahteraan bersama. Namun, banyak masyarakat yang tidak mau ikut andil dalam pemilihan. Oleh karena itu, dalam sosialisasi butuh komunikasi yang baik dengan masyarakat. Menurut Rogers (1982) komunikasi sebagai sesuatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Pemilihan strategi menjadi komponen paling penting dalam mencapai tujuan akhir dari komunikasi, pemilihan strategi merupakan langkah krusial memerlukan penanganan secara hati-hati dalam perencanaan komunikasi.

Pada tanggal 27 Juni 2018 KPU Kota Makassar telah menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 dengan tingkat partisipasi pemilih 990.836 dengan pengguna suara 584.406 sehingga persentase partisipasi masyarakat sebesar 58,98% (KPU Kota Makassar, 2018). Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Sa'ban, Sadat, & Nastia, 2019) Tingkat partisipasi masyarakat di Kota Bau-Bau tergolong tinggi dikarenakan jika diakumulasikan sebesar 69,87% %. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah perangsang politik, faktor karakteristik pribadi, faktor karakteristik

sosial, keadaan politik. Dugaan sementara permasalahan ketidakikutsertaan partisipasi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor pekerjaan, faktor domisili misalnya wilayah pilih tidak sesuai dengan wilayah domisili, tidak tahu terkait adanya pemilihan dan dilema dengan kandidat pilihannya.

Dari data ini tentu peran Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoala sebagai badan penyelenggara/*ad hoc* KPU Kota Makassar yang menjalankan strategi komunikasi dalam proses sosialisasi kepada masyarakat dan informasi-informasi terkait penyelenggaraan teknis pilkada. Informasi yang didalamnya bentuk sosialisasi nantinya dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengetahuan politik sehingga masyarakat teredukasi tentang pentingnya pendidikan hak politik.

Tentu dalam menangani masalah komunikasi, para perencana dihadapkan beberapa persoalan terutama dalam penggunaan sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Menurut Middleton (Cangara, 2014) strategi komunikasi yaitu kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.

Strategi komunikasi merupakan panduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus dapat menunjukkan pelaksanaan operasional secara taktis harus dilakukan. Dalam arti bahwa pendekatan dapat berbeda dengan mempertimbangkan faktor situasi dan kondisi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan objek berdasarkan fakta dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan, sehingga memudahkan peneliti

untuk memperoleh data yang objektif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang memberikan gambaran berdasarkan fenomena atau kenyataan yang terjadi mengenai Strategi Komunikasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontoala dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggambarkan bagaimana strategi komunikasi PPK Bontoala di masa pandemi covid-19 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020 dilaksanakan.

Adapun sumber data yang digunakan terbagi dua yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung langsung dilapangan yaitu pertama peneliti melakukan pengamatan seperti apa kondisi lapangan dan pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota makassar menurut para informan yang terkait di lokasi penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan penelitian, dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung melalui daftar pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya. Adapun dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengambil dokumentasi pada setiap kegiatan penelitian yang dilakukan, dokumentasi yang akan diambil yaitu berbentuk rekaman atau foto.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yang dikemukakan Miles dan Huberman (2014) yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan pengabsahan data dengan menggunakan hasil triangulasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana bagi rakyat di daerah untuk melakukan aktivitas seleksi kepemimpinan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pemilihan kepala daerah rakyat berperan penuh untuk memilih siapa pemimpinnya, wakilnya yang layak untuk memimpin dan menduduki parlemen dalam struktur pemerintahan (A Zarkasi, 2020).

Mengkaji komunikasi organisasi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar bukan hal yang mudah. Salah satu indikator kualitas Pilkada adalah tingkat partisipasi pemilih. Pemilihan serentak Makassar 2020, KPU Kota Makassar mengikuti target nasional yaitu 77,5 persen tingkat partisipasi pemilih. Akan tetapi, data partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat kurang memiliki orientasi dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini, dapat dibuktikan dengan hasil Pilkada tahun 2018 partisipasi pemilih Makassar berada di bawah target nasional yakni hanya 58,98 persen. Partisipasi Politik masyarakat diharapkan dapat mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2020.

Peneliti memfokuskan permasalahan pada strategi komunikasi dalam meningkatkan partisipasi politik dengan menggunakan model pendekatan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan walikota dan wakil walikota makassar tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data dari beberapa informan dan diuraikan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Liliweri (2014) mengenai fungsi komunikasi organisasi bersifat umum dibagi dalam 5 (lima) kategori, sebagai berikut, komunikator, pesan yang dinyatakan, media yang digunakan, komunikan, dan efek yang didapatkan:

a) Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoala

Peranan komunikator sangat penting, fungsinya untuk meningkatkan perhatian masyarakat dengan turut andil berpartisipasi

dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Terdapat faktor penting yang harus dimiliki oleh komunikator sebelum melaksanakan kegiatannya yaitu daya tarik dan kredibilitasnya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada HS selaku Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, dalam wawancara sebagai berikut.

“yang melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi yaitu anggota PPK yang ditunjuk untuk melakukan sosialisasi. Tentu hal ini agar *source* yang diperoleh masyarakat dapat dipercaya dan kredibel, selain itu tentu orang diluar PPK Bontoala juga dapat berpartisipasi melakukan kegiatan sosialisasi seperti Panwaslu Bontoala, tujuannya agar masyarakat paham terkait tahapan Pilkada 2020, kami sebagai PPK Bontoala mengajak dan berkerjasama dengan PPS, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tahapan Pilkada 2020”

Peran PPK sebagai *ad hoc* KPU Kota Makassar melaksanakan pilkada dengan baik dan sukses namun perlu dijalankan melalui kolaborasi *stakeholder* termasuk pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk mendukung Pilkada Kota Makassar, pemberian sosialisasi langsung maupun tidak langsung berupa ajakan persuasif kepada masyarakat, pemberian informasi kepada seluruh masyarakat khususnya kecamatan Bontoala secara merata baik kalangan pemilih pemula, pemilih disabilitas, dan pemilih milenial bahkan lanjut usia

b) Sosialisasi

Sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik menurut Joko J Prihatmoko (2005) adalah membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik serta partisipasi politik rakyat. Sosialisasi tentu merupakan tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoala untuk memberikan hak masyarakat akan informasi Pilkada, sosialisasi tentu bertujuan agar masyarakat turut andil berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun 2020 di Kota Makassar.

Pelaksanaan sosialisasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoala dengan mengadakan kegiatan mengajak masyarakat turut andil berpartisipasi dalam Pilkada seperti, *KPU goes to school*, relawan demokrasi, gerakan mencoklit dan sosialisasi pendidikan pemilih tingkat kelurahan.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada AM selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, dalam wawancara sebagai berikut.

“kami melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat seperti *goes to school* tentu fokus ke pemilih pemula, kegiatan relawan demokrasi juga dilaksanakan. Selain itu sosialisasi pendidikan pemilih di tingkat kelurahan, kami lakukan dalam 6 tahap sosialisasi tentu untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan Pilkada 2020. Kegiatan ini tentu merupakan perpanjangan tangan dari KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) semua turut andil melaksanakan sosialisasi”

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa PPK Bontoala sebagai penyelenggara pilkada telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan sasaran komunikasi meliputi semua elemen masyarakat, pemilih pemula, komunitas, dan juga keagamaan. Komunikasi yang dilakukan untuk sosialisasi meliputi publikasi media online, komunikasi tatap muka, dan mobilisasi sosial dengan seluruh *stakeholder* seperti Camat Bontoala, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, PPS, PPDP supaya kegiatan dapat berjalan secara massif dan menjangkau semua masyarakat.

c) Pemilihan Media Komunikasi dan Sosialisasi

Sosialisasi dengan menggunakan media komunikasi berupa pemberian informasi pelaksanaan pilkada. Dengan adanya penggunaan di berbagai media komunikasi yang digunakan oleh PPK Bontoala dalam melakukan sosialisasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2020, merupakan hal penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat

yaitu menggunakan spanduk hotline pelayanan pemilih, papan pengumuman, media elektronik dan media sosial tentu sangat diperlukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tanpa harus bertemu secara langsung.

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada HS selaku Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, dalam wawancara sebagai berikut.

“kami menggunakan semua media dalam sosialisasi seperti media sosial, media cetak elektronik, spanduk tujuannya bahwa kita ingin memberikan informasi secara massif di masyarakat, untuk menggunakan hak pilihnya di masa pandemi Covid-19 dengan mengajak masyarakat untuk taat menggunakan protokol kesehatan secara ketat pada pemilihan Pilkada 2020”

Pemanfaatan berbagai media ini PPK Bontoala memanfaatkan teknologi dalam melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial meliputi akun facebook PPK Bontoala 2020, Instagram PPKBontoala2020. Dengan akun ini PPK telah melakukan penyebaran informasi mengenai berbagai tahapan pilkada dan informasi sosialisasi lainnya.

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa PPK Bontoala sebagai penyelenggara pilkada tidak tinggal diam dalam menanggapi perkembangan teknologi dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi dalam sosialisasi merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, penggunaan media seperti media elektronik dan media sosial untuk memberikan informasi terkait pilkada kepada masyarakat secara massif. Tidak hanya menggunakan media saja tapi juga mengerahkan anggota PPK untuk turun lapangan dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih.

d) Sasaran Komunikan

Memahami masyarakat yang akan menjadi target sasaran program komunikasi merupakan hal yang penting. Pengenalan mengenai masyarakat dilakukan melalui observasi, berdasarkan pengalaman dan

pemahaman dari komunikator agar masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi dapat disesuaikan. Peran PPK sebagai peran utama di tingkat kecamatan dalam melaksanakan Pilkada Kota Makassar Tahun 2020, harus mengenali lebih baik masyarakat partisipatif pilkada dan partai politik yang ada di Kecamatan Bontoala agar berjalan optimal dan sukses.

“kami membangun komunikasi di masyarakat agar partisipasi masyarakat meningkat dan meningkatkan Kerjasama dengan stakeholder seperti Pemilih tingkat keluarga, Pemilih Pemula, Masyarakat Umum, Partai Politik Peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan, Instansi Pemerintah, Organisasi Masyarakat, Komunitas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, PPS dan stakeholder lainnya”

Target sosialisasi yang diharapkan PPK Bontoala dapat mengenali khalayak lebih baik. Strategi komunikasi ini diharapkan lebih optimal dan tidak salah sasaran. Dapat disimpulkan bahwa PPK Bontoala sudah mengklasifikasikan khalayak sesuai dengan referensi dan analisis situasi dan kondisi.

Dengan kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, menumbuhkan kesadaran positif menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga tingkat partisipasi pemilih dan kualitas Pilkada dapat berjalan optimal dibandingkan pemilihan sebelumnya.

e) Tingkat Partisipasi Masyarakat

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada SRA selaku Anggota Divisi Data dalam wawancara sebagai berikut.

“dimasa pandemi covid-19 ini menjadi tantangan serius dibandingkan pilkada tahun 2018 dalam meningkatkan presentase jumlah partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Tentu berbagai metode yang kami gunakan termasuk sosialisasi, larangan menerima money politik”

Temuan penelitian menyatakan efek dalam sosialisasi pilkada tersebut yang diharapkan adalah peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pemilihan pilkada. Jumlah partisipasi masyarakat, tentunya Panitia Pemilihan Kecamatan Bontoala sebagai *ad hoc* KPU Kota Makassar mengharapkan peningkatan jumlah persentase partisipasi masyarakat yang ditargetkan meningkat pada pilkada periode berikutnya dengan mengikuti target nasional yaitu 77,5 persen tingkat partisipasi pemilih tentu harapannya dapat melebihi partisipasi pemilih pada pilkada sebelumnya yaitu peningkatan sebesar kurang lebih 5%, .

Menurut Laswell (Deddy Mulyana, 2014) menjelaskan bahwa dampak apa yang terjadi kepada komunikan setelah menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sebuah pesan dikatakan memiliki arti bagi orang yang menerimanya apabila pesan tersebut memiliki dampak yang dapat merubah sudut pandang orang lain seperti cara berpikir, sikap, perilaku, dan lain-lain. Tetapi perubahan perilaku pada masyarakat masih sedikit yang menyadari pentingnya pemilihan kepada daerah sebagai golongan putih atau tidak memilih. Tetapi ada diantara masyarakat lainnya yang sudah sadar akan pentingnya pemilihan kepala daerah

4. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontoala sebagai badan penyelenggara/*ad hoc* sangat dibutuhkan untuk menjalankan strategi komunikasi sehingga informasi tentang pengetahuan pemilihan kepala daerah yang terkandung dalam sosialisasi nantinya akan menjadikan masyarakat lebih cerdas politik. Strategi komunikasi PPK Bontoala yang digunakan antara lain, tatap muka, media elektronik, sosial media, sosialisasi kepada pemilih milenial berupa ceramah dan dialog secara langsung dan menggunakan relawan demokrasi. Selanjutnya, informasi dalam bentuk program gerakan mencoklik, informasi berupa template cara memilih, informasi mengenai kapan pelaksanaan pemilih kepala daerah, serta informasi sah atau tidaknya surat suara yang dicoblos dan terakhir, motivasi yang dilakukan PPK

Bontoala tentang pemberian pemahaman pentingnya hadir ke TPS dan menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin. Terdapat faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi antara lain kesadaran masyarakat terhadap pemilihan, peran peserta pilkada, peran pemerintah setempat dan stakeholder. Selain itu hambatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat antara lain hambatan administrasi baik tempat dan waktu sosialisasi dan kurangnya SDM yang mampu dalam mengoperasikan media sosial. Diharapkan strategi yang digunakan PPK Bontoala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat bisa berjalan maksimal dan memperluas pengetahuan tentang strategi komunikasi, dan diharapkan memiliki upaya baru dalam meningkatkan partisipasi pemilih tidak monoton, jangkauan dan kuantitasnya diperbanyak, serta pelaksanaan pilkada pada hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama antara penyelenggara, pemerintah, partai politik dan masyarakat perlunya ada koordinasi dan kerjasama yang saling menguatkan dan berkelanjutan.

5. Ucapan Terima Kasih

Sebagai bentuk apresiasi kami kepada pihak-pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam terselenggaranya kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar dan Pemerintah Kecamatan Bontoala serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontoala, atas bantuannya selama penelitian ini dilaksanakan.

Daftar Pustaka

Jurnal

Sa'ban, L. M. A., Sadat, A., & Nastia. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2018. *Jurnal Universitas Pancasakti Tegal* Volume 4 (April) Halaman 29-38.

Arfah, Sitti Rahmawati. (2021). Penilaian Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bontoala Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2020. *Jurnal I La Galigo* Volume 4 No 1 April 2021.

Buku

- Cangara, H. (2014). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Liliweri, Alo. (2017). *Komunikasi Antar Personal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyana, Deddy. (2014). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Bandung Alfabeta.
- Prihatmoko, Joko J. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sumber Lainnya

- Surat Edaran KPU RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Non-Alam
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota

Website KPU Kota Makassar. <https://kota-makassar.kpu.go.id/>